

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi ekonomi global semakin memaksa perusahaan/organisasi bagi melaksanakan aktivitas ekonominya dengan baik tanpa batas. Ekonomi berlaku bagi semua orang mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan serta pemerintah. Semua perusahaan/organisasi pada melaksanakan aktivitas usahanya selalu membutuhkan dana guna menunjang aktivitas operasionalnya begitu pula dengan lembaga pengajaran. Lembaga pengajaran

Sekolah adalah sebuah badan yang mengatur serta mengadakan aktivitas-aktivitas pada hal intelektual, spiritual anggaran juga keterampilan. Sebagai tempat dimana orang-orang berkumpul secara rasional, sistematis, serta terarah pada memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana serta lain sebagainya yang dipakai secara efektif serta efisien bagi tercapainya tujuan pengajaran. Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyangkut sistem pengajaran nasional menuliskan bahwasanya semua warga negara yang berumur 7-15 tahun wajib mengikuti pengajaran dasar.

Pengajaran tidak pernah luput ataupun terlepas dari sebuah pembiayaan, sebab dari pembiayaan tersebut pengajaran bisa berjalan. Semua sekolah entah di kabupaten ataupun provinsi, kota ataupun desa, swasta ataupun negeri harus sanggup melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik bagi bisa mengatur sumber daya manusia serta keuangan dengan baik pula. bagi itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan bagi

bisa melaksanakan keuangan sekolah dengan baik. pada operasinya sekolah juga dituntut bagi bisa mengalokasikan serta memakai sumber dana yang ada secara efektif serta efisien. Semua sekolah pasti mempunyai sumber dana sendiri dari sejumlah pihak menyangkut yang secara otomatis selalu menunjang kebutuhan serta aktivitas operasionalnya. Upaya pemerintahan membuat skema dana BOS lewat dapertemen pengajaran nasional serta departemen agama yang langsung diberikan ke rekening sekolah dengan harapan langkah ini bisa meminimalisir adanya praktik pungli serta manupulasi. Program dana BOS bertujuan mengurangi beban biaya orangtua murid sehingga murid pada kategori kurang sanggup bisa memperoleh pengajaran gratis. Tidak hanya meringankan tagihan biaya sekolah namun dana BOS bisa pula dipakai sekolah bagi memberi bantuan berupa uang transport bagi siswa pada ketegori kurang sanggup serta meningkatkan kualitas proses pengajaran di sekolah. Unsur yang terlibat pada pemakaian dana BOS ialah tim manajemen pusat, tim manajemen BOS provinsi, tim manajemen BOS Kabupaten/Kota, serta sekolah.

Posisi terpenting pada menentukan pemakaian dana BOS ialah milik sekolah, sebab sekolah langsung terlibat pada pemakaian dana tersebut. Sesuai dengan ketetapan bahwasanya kepala sekolah, guru, serta bendahara bertanggung jawab penuh atas pemakaian dana BOS. Sekolah diberikan kewenangan agar bisa memakai dana BOS bagi berbagai jenis pengeluaran sesuai dengan panduan program serta berdasarkan atas Rencana anggaran Pemasukan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disusun oleh sekolah serta komite sekolah. Terutama bagi lembaga pengajaran di daerah, di mana sumber

daya manusia berpengalaman pada pemakaian dana terbatas, kompleksitas pemakaian dana BOS menjadi tantangan serius. Dengan jumlah dana yang signifikan serta dampaknya yang melibatkan banyak pihak, kurangnya pengalaman serta sumber daya manusia bisa menyebabkan penyimpangan pemakaian dana BOS. Akibatnya, tata kelola, akuntabilitas, serta citra publik sekolah mungkin tidak bisa terwujud dengan baik.

Analisis pemakaian keuangan sekolah bertujuan bagi menilai kondisi keuangan, khususnya bagaimana sekolah mengatur dana yang dimilikinya. pemakaian keuangan sekolah harus mematuhi prinsip-prinsip yang diatur pada ketentuan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 menyangkut pembiayaan pengajaran, seperti prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. pemakaian keuangan sekolah menjadi hal krusial bagi mengorganisir kebutuhan sekolah secara efektif. Praktik pemakaian keuangan yang baik serta terarah mempunyai dampak yang signifikan pada oprasional serta kualitas pengajaran di sekolah. Oleh sebab itu, pemakaian keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik agar dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan secara efektif serta efisien. Hasibuan (2011:2) mendefinisikan pemakaian sebagai seni serta ilmu pada mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dengan efektif serta efisien bagi mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip pemakaian keuangan sekolah yang baik melibatkan asas pemisahan tugas, perancangan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan.

Sesuai yang tercantum pada jurnal pengajaran serta keislaman oleh Ahmad Ridwan serta Halimatun Sakdiyah, sumber dana pengajaran

diantaranya yaitu; berasal dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, orangtua siswa, orangtua asuh, peserta didik serta dari yayasan. Sumber dana tersebut nantinya serta bisa dipakai bagi pembiayaan atas aktivitas penunjang oprasional semua periode tertentu. Pembiayaan ataupun biasa disebut pembiayaan mempunyai peran penting pada menggerakkan sebuah organisasi salah satunya sekolah. Seperti halnya organisasi, sekolah semua tahun diwajibkan membuat Rencana anggaran Pemasukan Biaya Sekolah (RAPBS) bagi melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Di pada Rencana anggaran Pemasukan Biaya Sekolah (RAPBS) terdapat pemasukan serta pemakaian biaya oprasional sekolah. biaya oprasional inilah yang melambangkan pembiayaan pengajaran.

SMA Negeri 1 Larantuka ialah salah satu lembaga pengajaran serta adalah satu-satunya SMA Negeri di Kota Larantuka kabupaten Flores Timur. Manajemen pemakaian sekolah secara umum ditopang oleh guru-guru yang mempunyai serta potensi akademik sesuai serta berpengalaman. Berdasarkan letak serta satu-satunya SMA Negeri di Kota Larantuka menjadikan sekolah paling banyak diminati peserta didik lulusan SMP dari tahun ke tahun. Berpijak pada kondisi tersebut, maka diperlukan pengembangan aspek pengajaran secara berkelanjutan bagi meningkatkan kualitas serta mutu SMA Negeri 1 Larantuka sebagai sekolah yang masih berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN). Walaupun lembaga pengajaran seperti ini adalah lembaga non-profit, namun faktor finansial serta kondisi keuangan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan lembaga ini. Kondisi keuangan bisa dikatakan cukup stabil apabila masuk pada beberapa kriteria yang telah

ditentukan, oleh sebab itu dibutuhkan pemakaian serta pengalokasian keuangan sekolah yang transparan serta akuntabel supaya tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini. Maka dari itu SMA Negeri 1 Larantuka membuat pelaporan keuangan semua periode tertentu yang menyangkut dengan sumber dana serta pemakaiannya, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rencana serta Realisasi anggaran Sumbangan Penyelenggaraan Pengajaran (SPP) SMAN 1 Larantuka

TAHUN AJARAN	PENERIMAAN (Rp)		PENGELUARAN (Rp)	
	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
2019-2020	3.029.316.409	2.423.114.305	3.029.316.409	2.237.761.000
2020-2021	2.491.853.305	2.085.645.994	2.491.853.305	1.886.411.200

Sumber : SMAN 1 Larantuka 2023

Selain pelaporan keuangan menyangkut dana sumbangan penyelenggaraan pengajaran (SPP), SMA Negeri 1 Larantuka juga membuat pelaporan keuangan menyangkut dana BOS. Berikut pelaporan keuangan dana BOS SMA Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2019 s/d 2021 :

Tabel 1.2

Rencana serta Realisasi anggaran Dana BOS SMAN 1 Larantuka

	PENERIMAAN (Rp)		PENGELUARAN (Rp)	
	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
2019	1.490.440.215	1.310.279.250	1.490.440.215	1.310.279.250
2020	1.719.150.000	1.666.500.000	1.151.670.250	1.229.950.000
2021	1.883.430.000	1.883.430.000	1.883.430.000	1.883.430.000

Sumber : SMAN 1 Larantuka 2023

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwasanya ada kesamaan pemakaian keuangan dana SPP serta dana BOS yaitu selalu ada pencatatan bagi

penerimaan serta pengeluaran menyangkut rencana serta realisasi anggaran. Jika dilihat dari tabel 1.1 serta tabel 1.2 rencana penerimaan serta realisasi penerimaan selalu mengalami fluktuasi semua tahun begitu pula dengan pengeluaran. Dana BOS yang disalurkan pemerintahan mempunyai jumlah yang cukup besar sehingga timbul pertanyaan apakah sekolah sebagai organisasi nirlaba sanggup mengatur keuangan yang ada sejalan dengan adanya fluktuasi disemua tahun anggarannya. Sedangkan yang membedakan yaitu pemakaian dana bos dilihat serta dilakukan menurut tahun anggaran berbeda dengan pemakaian dana SPP yang dilihat serta dilakukan menurut tahun ajaran. Berikut ialah tabel jumlah siswa/siswi SMAN 1 Larantuka.

Tabel 1.3

**Jumlah Siswa/i SMAN 1 Larantuka
Tahun Ajaran 2019/2020 serta 2020/2021**

NO	KELAS	TAHUN AJARAN	
		2010/2020	2020/2021
1	X	413	428
2	XI	389	415
3	XII	301	387
JUMLAH		1103	1230

Sumber : SMAN 1 Larantuka 2023

Berdasarkan tabel 1.2 serta tabel 1.3 bisa disimpulkan bahwasanya penerimaan anggaran dana BOS SMAN 1 Larantuka tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.320.279.250 dengan total siswa/siswi per desember 2019 ialah 1.103 siswa/siswi. pada petunjuk teknis BOS SMA 2019 dijelaskan bahwasanya penerimaan dana BOS per siswa 2019 ialah sebesar Rp. 1.400.000 maka seharusnya total penerimaan dana BOS tahun 2019 lebih besar dari yang telah diterima oleh sekolah.

Berdasarkan penelitian Monika Jayatri tahun 2012 dengan judul “Analisis Pengelolaan dana Bantuan operasional Sekolah di SMPN 11 Yogyakarta serta SMPN 1 Purworejo” menyimpulkan bahwasanya pemakaian dana BOS di kedua sekolah belum terlalu baik. Masih ada beberapa kesalahan, yang paling umum terjadi yaitu kurangnya kelengkapan administrasi serta bukti transaksi. pemakaian fasilitas sekolah menyangkut dana BOS di SMPN 1 Purworejo belum terlalu baik, aktivitas inventarisasi sudah lama belum dilakukan terhadap barang yang dimiliki sedangkan di SMPN 11 Yogyakarta pemakaian fasilitas secara keseluruhan tidak bisa diketahui dengan jelas. Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Abid Dzulfikar tahun 2015 dengan judul “Analisis pemakaian Keuangan Sekolah di SMAN se-Kabupaten Kendal” disimpulkan bahwasanya perancangan pada pemakaian keuangan sekolah, yang diimplementasikan dengan RAPB SMAN se-Kabupaten Kendal, telah dilakukan dengan adil serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, realisasi pemakaian keuangan sekolah, yang telah dilaporkan dengan pelaporan pertanggungjawaban APB SMAN se-Kabupaten Kendal, sudah berjalan secara efisien serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Namun, dari dua penelitian tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya tidak semua lembaga pengajaran sanggup serta berhasil mengatur keuangannya. Faktanya, masih banyak terjadi penyimpangan terhadap dana BOS, yang menunjukkan bahwasanya pemakaian keuangan oleh lembaga pengajaran masih jauh dari kata efisien. pada pemeriksaan oleh BPK terhadap sekolah penerima dana BOS di DKI Jakarta tahun 2007-2009, mendapati

bahwasanya adanya penyelewengan pemakaian dana sebesar Rp. 5,7 miliar. Penyimpangan tersebut tidak hanya menyangkut dengan dana BOS tetapi juga dengan pemakaian administrasi lainnya. Sebagai institusi pengajaran, sekolah seharusnya mengatur sumber daya keuangan dengan baik bagi mendukung aktivitas operasionalnya tanpa adanya penyalahgunaan yang bisa merugikan pihak-pihak terkait. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis diketahui realisasi pemakaian dana BOS SMAN 1 Larantuka besarnya tidak sama dengan yang telah direncanakan pada ARKAS. Hal yang paling menonjol yaitu pemakaian dana BOS bagi komponen pengadaan buku K13, telah direncanakan dengan biaya sebesar Rp. 65.138.000 namun pada realisasi sebenarnya tidak ada pengadaan buku K13 tahun anggaran terkait, Selanjutnya pemakaian dana BOS 2020 bagi pengadaan buku pelajaran terdapat selisih sebesar Rp. 119.436.900. Hal ini tentu menyebabkan kelebihan ataupun sisa dana yang cukup besar.

Mengingat bahwasanya baik buruknya kualitas pelayanan serta mutu pengajaran bergantung pada manajemen pemakaian keuangan di lembaga pengajaran itu sendiri serta kesalahaman pada pemakaian keuangan berdampak buruk bagi keberlangsungan oprasional sebuah lembaga pengajaran, maka penulis tertarik bagi meneliti lebih lanjut menyangkut pemakaian keuangan sekolah sebagai lembaga pengajaran non-profit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik bagi melakukan penelitian berjudul “Analisis pemakaian Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Larantuka)”.

B. Batasan Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup bagi penelitian ini yaitu hanya sebatas pemakaian dana BOS serta pemakaian sarana prasarana yang berasal dari dana BOS. pada pemakaian keuangan penulis fokus pada perancangan anggaran, catatan menyangkut transaksi, pencatatan transaksi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku hingga hambatan serta solusi pada pengelolaan dana BOS SMAN 1 Larantuka. Penulis melakukan penelitian terhadap pemakaian dana BOS SMA Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2019 serta 2020.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perancangan dana BOS di SMA Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020?
2. Bagaimana pemakaian dana BOS di SMA Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020?
3. Bagaimana pengawasan dana di BOS di SMA Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020?
4. Bagaimana pertanggungjawaban/pelaporan dana BOS di SMA Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2019 - 2020?
5. Apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat pada pemakaian keuangan di SMA Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami perancangan dana di BOS SMA Negeri 1 Larantuka

Tahun anggaran 2019 - 2020

2. Untuk memahami pemakaian anggaran dana di BOS SMA Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020
3. Untuk memahami pengawasan dana BOS di SMAN 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020
4. Untuk memahami pertanggungjawaban/pelaporan dana BOS di SMAN 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 serta 2020
5. Untuk memahami faktor yang menjadi pengambat serta faktor yang menjadi pendukung pemakaian keuangan dana BOS di SMA Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2019 - 2020

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan terutama bagi penulis, serta bisa sebagai bahan referensi bagi penelitian serupa berikutnya.

2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu sarana bagi mempertimbangkan keputusan terutama menyangkut pemakaian keuangan di sekolah terkait.